**ABSTRAK**

Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan salah satu program dari pemerintah dalam bentuk pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan maupun nonperizinan yang proses pelaksanaannya dapat dilakukan di setiap Kecamatan. Kecamatan Kaliwungu merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kudus yang menyelenggarakan program PATEN dimana dalam penyelenggaraannya masih sangat kurang partisipasi dari masyarakatnya, hal ini ditunjukan dengan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap program PATEN yang diselenggarakan di Kecamatan Kaliwungu, sehingga untuk target dari program PATEN yang telah ditentukan sebelumnya belum dapat tercapai secara maksimal. Untuk itu penulis mengambil judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS”**. Adapun tujuan magang penelitian untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan Izin Mendirikan bangunan (IMB) di Kecamatan Kaliwungu dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kaliwungu.

Metode magang yang digunakan dalam magang penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Untuk teknik pengumpulan data dalam magang ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil analisis menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Kaliwungu berjalan kurang baik. Adapun faktor-faktor penghambat yaitu Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, sumber daya dan fasilitas yang belum memadai, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum maksimal.

Guna terciptanya penyelenggaraan PATEN secara maksimal, alangkah baiknya dilakukan penambahan jumlah personil di bagian pelayanan, dan penambahan sarana dan prasarana yang dirasa kurang dalam penunjang pelayanan, serta dibuatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai bahan evaluasi kedepannya.

***ABSTRACT***

*Integrated District Administration Service* (PATEN*) it is one of the programs from government in the form of authority delegation given by Regent to sub-district head for facilitate the society to make licensing and non-licensingwhich the implementation process can be done in every sub-district. Kaliwungu sub-district it is one of sub-district in Kudus which organizes program* PATEN *where in the implementation still very less participation from the society, this is indicated by the low level of knowledge from the society about program* PATEN *which is held in* Kaliwungu *sub-district, so for target from program* PATEN *which has determined before can not be reached maximally. For that the author take the title* **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS”**. *As for the purpose of internship researchto know and analyze policy implementation to establishment of building permit services* (IMB*) in* Kaliwungu *sub-district and find factor-factor which is an obstaclein the provision of services* IMB *in* Kaliwungu *sub-district.*

*Internship method usedin this research apprenticeship is qualitative methods that are descriptive with an inductive approach. For data collection techniquesin this research useobservation techniques, interviews, and documentation.*

*Analysis results show that implementation* *Regent Regulation number* 33 of 2015 on the implementation PATEN *in* Kaliwungu *sub-district*  *the implementation is not good. The obstacle factors that is Lack of socialization to the society, inadequate resources and facilities, and SOP is not maximally.*

*For the implementation of* PATEN *maximally, it would be nice to add personnel or employeesin the service, and add facilities and infrastructurewhich is considered insufficient in supporting the service, and also made the Public Satisfaction Index* (IKM) *as an evaluation in the future.*